



Pengumuman Penerimaan Abstrak Konferensi Ilmiah Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2019

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam pendaftaran kegiatan Konferensi Ilmiah Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Adapun jumlah pendaftar sebagai pemakalah sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 pukul 21.00 adalah sebanyak 113 orang. Panitia telah melakukan penilaian terhadap abstrak, dan jumlah pemakalah yang diterima untuk kegiatan ini adalah sebanyak 36 orang berdasarkan peringkat skor.

Daftar pemakalah terpilih dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini. Kepada pemakalah terpilih diwajibkan mengisi lembar konfirmasi paling lambat tanggal 16 Oktober pukul 16.00. Pemakalah terpilih yang tidak mengumpulkan lembar konfirmasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri. Selanjutnya, pemakalah yang berada urutan berikutnya akan menggantikan keikutsertaan pemakalah yang mengundurkan diri (akan diinformasikan kemudian oleh panitia).

Jakarta, 15 Oktober 2019

Ketua Panitia Konferensi Ilmiah
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM,

Novia Swastika

Keterangan:

- Pendaftar dapat menanyakan informasi terkait pengumuman ini kepada panitia;
- Lembar konfirmasi pemakalah dikirim melalui email.

**Lampiran Pengumuman Penerimaan Abstrak Konferensi Ilmiah
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2019**

No.	Judul	Penulis	Afiliasi
1	Reformasi Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dinda Silviana Putri	Universitas Airlangga
2	Optimalisasi Sistem Antikorupsi dalam Perspektif Komunikasi Hukum dan Politik Hukum Pidana	Dr. Chontina Siahaan, SH, MSi	Universitas Kristen Indonesia
3	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur melalui E-learning	Rezeky Ana Ashal	Kementerian Hukum dan HAM RI
4	Membentuk Sistem Anti Korupsi Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Sejahtera	Irfan Ardiansyah	STIH Persada Bunda
5	Revitalisasi dan Restrukturisasi Rupbasan dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Aset Sitaan Hasil Tindak Korupsi	Antok Kurniyawan	Politeknik Ilmu Pemasarakatan
6	Kemenkumham Sebagai Organisasi Pembelajar: Studi Awal Kerangka Kerja Pengembangan SDM Hukum Nasional	Junaidi Abdillah	Balitbang Hukum dan HAM
7	Peran SDM Unggul Indonesia Maju Terhadap Peningkatan Ipak dalam Pelayanan Publik	Willy Wibowo	Balitbangkumham (Kementerian Hukum dan HAM)
8	Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam Invensi Bidang Obat-Obatan di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Abdul Kadir Jaelani	Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
9	Konstruksi Unsur Kesalahan pada Kebijakan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi; Menuju Sistem Anti Korupsi yang Berkeadilan	Elstonsius Banjo	Program Doktor Ilmu Hukum Fak.Hukum Univ. Indonesia

No.	Judul	Penulis	Afiliasi
10	Peluang Pengembangan Kualifikasi Legal Standing Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Korupsi Dalam Mahkamah Konstitusi	Kahfi Adlan Hafiz	Himpunan Mahasiswa Islam
11	Menakar Kompabilitas Transplantasi Omnibus Law dalam Konteks Peraturan Perundang-undangan dengan Sistem Hukum Indonesia	Sarah Safira Aulianisa	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
12	Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektornik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Rahmat Saputra	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
13	Optimalisasi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Efektifitas Strategi Pencegahan Dan Penindakan: Antara Extraordinary Crimes Dan Ordinary Crimes	Aras Firdaus	Universitas Quality
14	Urgensi Penataan Regulasi Dalam Rangka Menjamin Supremasi Hukum	Sudjana	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
15	Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri	Habib Adjie	Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
16	Dissenting Opinion sebagai Alternatif Referensi Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum	Sunny Ummul Firdaus	Universitas Sebelas Maret
17	Evaluasi Pelaksanaan Program "Getting Zero to Halinar (Handphone, Pungli, Narkoba)" di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Cipinang Jakarta	Indra Jaya Ali	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
18	Suara Putih Abu-Abu: Anak Tiri Subtansi Hukum Demokrasi Indonesia	Sarip	Universitas Muhammadiyah Cirebon

No.	Judul	Penulis	Afiliasi
19	Penataan Sistem Pencegahan Antikorupsi Melalui Gagasan Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai	Beni Kurnia Ilalahi	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
20	Implementasi Pengelolaan Pengetahuan Dalam Rangka Mewujudkan Organisasi Pembelajar di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Yuliana Primawardani	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM
21	Pembaharuan Hukum Pidana: Upaya Dekolonisasi Tindak Pidana Politik dalam RKUHP	syukron salam	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
22	Pengaruh Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Keberhasilan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum	Ali Muhammad	Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
23	Strategi Peningkatan Kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan di Indonesia Berdasarkan Metode Analisis SWOT	Dannissa Azizah Rahmadiyahanti	Balai Pemasaryakatan Kelas I Jakarta Barat
24	Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Aset Negara	Koesmoyo Ponco Aji	Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM
25	Duplikasi Kewenangan Bnpt Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Khusus Teroris Sentul	Umar Faruq Mahmud	Lapas Narkotika Kelas IIA Madiun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
26	Pengembangan Poltekip Sebagai <i>Corporate University</i> dalam Meningkatkan Standar Mutu dan Pengembangan Sdm Pemasaryakatan	Dimas Dhanang Sutawijaya	Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
27	Tantangan Regulasi Di Era Disrupsi Digital Dalam Perspektif Sosiologi Hukum	Muhammad Ivan	Departemen Kriminologi Universitas Indonesia

No.	Judul	Penulis	Afiliasi
28	Optimalisasi Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa	Mukhlisin	Muhammadiyah
29	Konfigurasi Keadaan Darurat dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Andryan	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
30	Harmonisasi Regulasi di Indonesia Melalui Penataan Hierarchi Perundang-undangan	Sulardi	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
31	Strategi Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi yang Efektif di Lembaga Pemerintahan Kota Bekasi	Rona Apriana Fajarwati, S.H., M.H.	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
32	Optimalisasi Kompetensi Manajemen Sumber Daya Legislasi Nasional dalam Konstruksi Hukum Nasional	Mochamad Isnaeni Ramdhan	Fakultas Hukum Universitas Pancasila
33	Strategi Pengembangan SDM Hukum Melalui Pengembangan Skema Sertifikasi Kompetensi	Sugeng	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
34	Penerapan <i>Fraud Risk Assessment</i> atas Pengelolaan Keuangan Negara Guna Mencegah Korupsi di Indonesia	Heber Anggara Pandapotan SH, CLA, CAI	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP-RI)
35	Akuntabilitas Birokrasi: Kendala Utama dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia	Nuralia, S.Kom., M.Kom	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
36	Sumber Daya Manusia Hukum Quo Vadis? Profesionalisasi di dalam Sistem Hukum Nasional dengan Pendekatan Teori Sistem Hukum Luhmann	Sabrina Nadilla	Pusat Litbang Hak Asasi Manusia, Badan Litbang Hukum dan HAM